#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

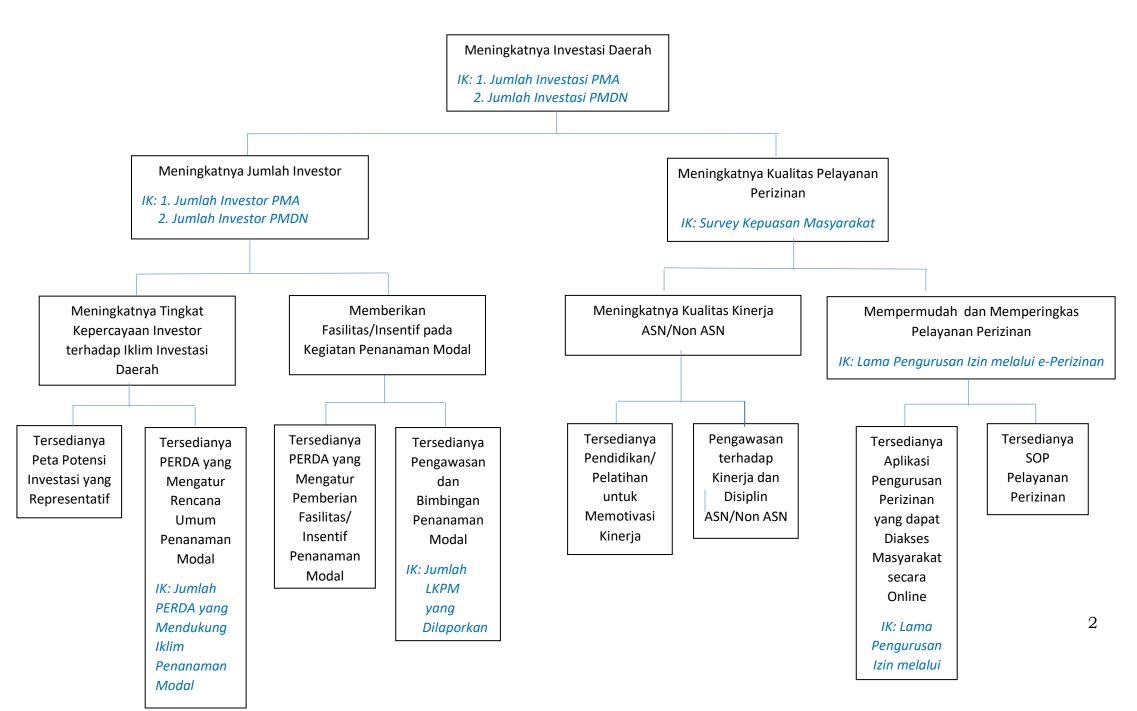
Rencana Strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah dokumen Perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Sedangkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah meningkatkan investasi daerah.

Melihat latar belakang di atas dapat dijelaskan fungsi dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sesuai dengan pohon kinerja sebagai berikut :

#### **POHON KINERJA**



#### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 5, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
   Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambagab Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
- 15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026;
- 16. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);
- 17. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 39);

# 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

- Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
- 2. Meningkatkan kinerja instansi lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mempertanggungjawabkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- 3. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, meliputi: Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Tantangan dan Peluang;
- BAB III Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
  Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Binjai,
  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
  Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis;
- BAB IV Tujuan dan Sasaran yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Tujuan dan Sasaran yang berhubungan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD;
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan; BAB VII Kinerja Penyelanggara Bidang Urusan BAB VIII Penutup

#### BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SATU PINTU KOTA BINJAI

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- 2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- 3. Pengkoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- 4. Penyelenggaraan pendaftaran pengelolaan data dan pelayanan informasi perizinan;
- 5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai terdapat terdiri dari :

# 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangm penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagaian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat d daerah (SKPD);
- c. Mengkoordinir Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mengkoordinir urusan umum dan kepegawaian;
- h. Mengkoordinir urusan pengelolaan keuangan dan aset, dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaiankepegmempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola urusan surat menyurat/ tata naskah dinas dan kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi umum;
- d. Melakukan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai dinas;
- e. Mekakukan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;
- f. Melakukan fasilitas penilaian prestasi kerja pegawai dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
- h. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam penguasaan SKPD;

- i. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai denngan tugas dan fungsinya.

# 4. Subbagian Keuangan dan Program

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Program;
- b. Menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- c. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- g. Melaksanakan urusan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai denngan tugas dan fungsinya.

## 5. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang penanaman modal;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program dan melaksanakan promosi dan investasi di dalam dan di luar negeri;
- c. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
- h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Investasi dan Penanaman Modal

Seksi Investasi dan Penanaman Modal dipimpin Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Investasi dan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Investasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi investasi dan penanaman modal;
- b. Membuat bahan promosi tentang potensi daerah melalui media cetak, brosur maupun media elektronik;
- c. Merencanakan kegiatan misi promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Mengkaji, merumuskan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informas penanaman modal skala kota;
- e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data potensi daerah untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam pengambilan kebijakan dan petunjuk teknis di dalam penanaman modal daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dalam perencanaan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, pemberian rekomendasi pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;

- h. Berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# 7. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi

Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Pengembangan Kerjasama dan Promosi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistens bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- c. Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal bidang pengembangan kerjasama dan promosi;
- d. Membuat profil investasi;
- e. Memberikan informasi potensi daerah dalam rangka pengembangan kerjasama dan promosi;
- f. Mengadakan pameran dalam dan luar daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 8. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal di lingkup Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang eksistensi bidang pembinaan dan pegawasan;
- c. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pengawasan untuk mencegah kemungkinankemungkinan penyimpangan;
- e. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan usaga, kesehatan dan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- d. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang usaha;
- e. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang kesehatan;
- f. Koordinasi pelayanan perizinan perekonomian di bidang pendidikan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 10. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan di lingkup pelayanan perizinan usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Perizinan Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan di bidang usaha;
- c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan bidang usaha;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di , bidanng usaha izin gangguan, SIUP, TDP, usaha perternakan, TDI, IUP2T, IUPP, usaha toko modern, pariwisata.
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang usaha;
- f. Melakukan penertiban dan distribusi surat perizinan di bidang usaha;
- g. Melakukan koordinas dalam rangka pelayanan perizinan usaha dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;

- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang usaha;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan perizinan usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 11. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan

Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Kepala Bidang di lingkup perizinan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
   pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
- c. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
- d. melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang kesehatan meliputi :
  - Izin Rumah Sakit
  - Izin Klinik
  - Izin Praktek Laboratorium Klinik
  - Izin Praktek Dokter
  - Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
  - Izin Praktek Bidan
  - Izin Kerja Fisioterafis
  - Izin Praktek Tenaga Gizi
  - Izin Praktek Perawat
  - Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optomentris
  - Izin Kerja Radiograper
  - Izin Praktek Tukang Gigi
  - Izin Praktek Apoteker
  - Izin Apotik
  - Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
  - Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional
  - Izin Toko Obat Berizin

- e. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang kesehatan;
- f. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang kesehatan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

Seksi Pelayanan Perizinan pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KepalaBidang pelayanan perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan lingkup pelayanan perizinan Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan di bidang Pendidikan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan,
   pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang pendidikan;
- c. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan dibidang pendidikan, dan ;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang pendidikan;
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan di bidang pendidikan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan di bidang Pendidikan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan di bidang Pendidikan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan di bidang pendidikan;

- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dibidang pendidikan ; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Pembangunan Reklame dan Lingkungan;
- c. Koordinasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Koordinasi pelayanan perizinan di bidang Pembangunan Reklame dan Lingkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# 13. Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup pelayanan izin mendirikan bangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan izin mendirikan bangunan;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;

- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang
   Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# 14. Seksi Perizinan Pengelolaan Keuangan

Seksi Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan pengelolaan lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan pengelolaan lingkungan;
- d. melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan pembangunan reklame dan lingkungan meliputi;
  - 1. Izin Lingkungan
    - -Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
    - -Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL)
    - -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
    - -Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ( DELH )
    - -Dokumen Pengeloaan Lingkungan Hidup ( PPLH )
    - -Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
  - 2. Izin Pembuangan Air Limbah;

- 3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4. Izin Pemangkasan/ Penebangan Pohon Penghijauan;
- 5. Izin Pemakaian Lapangan Merdeka.
- e. melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
- f. melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan pembangunan reklame dan lingkungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian perizinan pembangunan reklame dan lingkungan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan Pembangunan Reklame dan Lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

# 15. Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan

Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan lingkup perizinan konstruksi dan perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan;
- c. Melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan;
- d. Melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan konstruksi dan Perhubungan meliputi;
  - 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )

- 2. Izin Reklame
- 3. Izin Operasional Menara Telkom
- 4. Izin Trayek
- e. Melakukan pemeriksaan administratif dan teknis perizinan konstruksi dan perhubungan;
- f. Melakukan penerbitan dan distribusi surat perizinan konstruksi dan perhubungan;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan konstruksi dan perhubungan dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian perizinan konstruksi dan perhubungan;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Konstruksi dan Perhubungan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 16. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidangmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan dan pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penanganan pengaduan;
- b. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi;
- d. koordinasi penanganan pengaduan;
- e. koordinasi evaluasi dan pelaporan;
- f. koordinasi pengelolaan data dan informasi;
- g. Mengkoordinir penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# 17. Seksi Penanganan Pengaduan

Seksi Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi berkenaan dengan penanganan pengaduan dibidang perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Pengaduan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dibidang perizinan dan non perizinan;
- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
- e. melakukan penyuluhan dan pemberian informasi layanan perizinan, advice planning serta pengelolaan dan operasionalisasi call center;
- f. melakukan penanganan pengaduan;
- g. melakukan klarifikasi dan koordinasi terhadap permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# 18. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang pengelolaan data dan informasi lingkup evaluasi dan Pelaporan perijinan sesuai dengan standar pelayanan serta menyiapkan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi evaluasi dan pelaporan berdasarkan program kerja;
- b. mengkoordinasikan dan membuat pelaporan perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan kegiatan pengevaluasian hasil perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

- e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai koperensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- f. melakukan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# 19. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

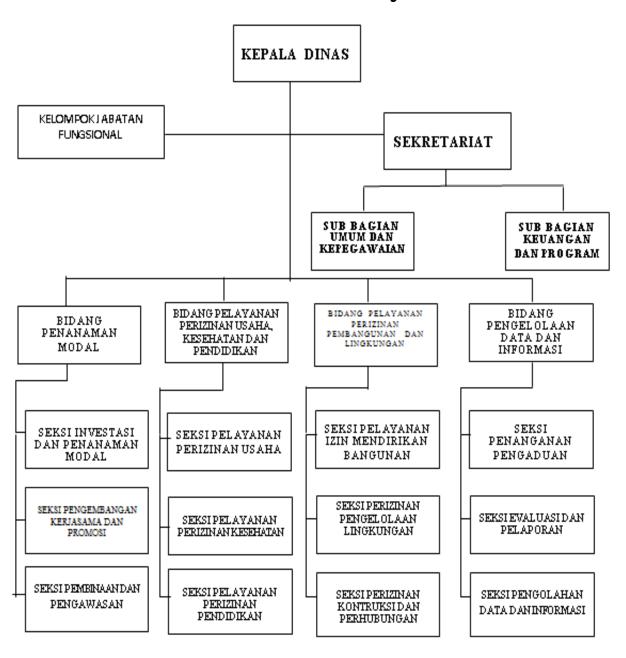
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan informasi lingkup pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan data dan sistem informasi perizinan;
- c. melakukan pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi dan sistem informasi perizinan;
- d. melakukan perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- e. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- f. melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- g. melakukan pengelolaan data perizinan dan non perizinan;
- h. melakukan penyusunan database perizinan dan non perizinan dan pemeliharaan database perizinan dan non perizinan;
- i. melakukan penyajian informasi perizinan dan non perizinan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Informasi; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu terdapat Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai



# 2.2 Sumber Daya

# 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu sebanyak 30 orang yang terdiri dari:

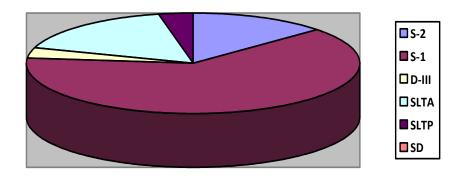
Pejabat Eselon II/a : 1 orang
Pejabat Eselon III/b : 1 orang
Pejabat Eselon III/a : 1 orang
Pejabat Eselon III/b : 4 orang
Pejabat Eselon IV/a : 12 orang
Staf (JFU) : 8 orang

Tabel 2.1.

Komposisi SDM tersebut berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1	S-2	6 orang
2	S-1	19 orang
3	D-III	1 orang
4	SLTA	1 orang
5	SLTP	0 orang
6	SD	0 orang

Grafik 2.1
Komposisi SDM berdasarkan jenjang sekolah



Tabel 2.1.

Kebutuhan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Kepala Bidang	4 orang
4	Kasubbag Umum	1 orang
5	Kasubbag Program dan Keuangan	1 orang
6	Analis Kebijakan Ahli Muda	12 orang
7	Bendahara	1 orang
8	Analis Keuangan	5 orang
9	Analis Perizinan	8 orang
10	Pengurus Barang Milik Daerah	1 orang
11	Petugas Front Office	4 orang
12	Petugas Back Office	2 orang
	Total	53 orang

Jumlah Pegawai Laki-Laki sebanyak 13 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 14 orang. Jumlah Tenaga Honorer sebanyak 21 orang dimana Tenaga Honorer Administrasi sebanyak 17 orang, dan Petugas Kebersihan sebanyak 2 orang, Petugas Penjaga Malam/Kantor sebanyak 2 orang. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai paling banyak tamatan Sarjana S-1 atau sekitar 63 %. Dari sisi staf masih diperlukan tambahan staf untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.2.

Data Aset dan Kondisinya

	NOMOR			FIKASI RANG			Asal/Cara	Tahun	Ukuran		Keadaan		JUMLA H	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Peroleha n Barang	Pem- belia n	Barang/ Konstruks i (P, S, D)	Satuan	Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.02.03.04.00	0001	Portable Generating Set	Big Power	-	Besi	Pembelian	2011			Baik	1	5.900.000,00	genset
2	02.02.03.04.00	0002	Portable Generating Set	POWERFULL DIESEL SILENT 30KVA /	bm17_dpm_0029	BESI	Pembelian	2017			Baik	1	105.340.000,00	Portable Generating Set
3	02.03.01.01.00	0001	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	K4100495 TOYOTA /	MHFM1BA3JBK3841 44	BESI	Pembelian	2011	1298 CC		Baik	1	169.621.000,00	Mobil Avanza
4	02.03.01.05.00	0001	Sepeda Motor	AVANZA 1300 G SUPRA X 125 R	МНІЈВ G 117 С K 07085	FIBER	Pembelian	2011			Baik	1	16.478.750,00	APBD. BAG. UMUM
5	02.03.01.05.00 1	0002	Sepeda Motor	suzuki	MH88F45SADJ17321	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	15.900.000,00	APBD. BAG. UMUM
6	02.03.01.05.00 1	0003	Sepeda Motor	suzuki	MH88F45SADJ17321 1	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	15.900.000,00	APBD. BAG. UMUM
7	02.03.01.05.00 1	0004	Sepeda Motor	suzuki	MH88F45SADJ17320 7	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	15.900.000,00	APBD. BAG. UMUM
8	02.03.01.05.00 1	0005	Sepeda Motor	suzuki	MH88F45SADJ17319 6	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	15.900.000,00	APBD. BAG. UMUM
9	02.03.01.05.00 1	0006	Sepeda Motor	suzuki	MH8BF45SADJ- 173195	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	15.900.000,00	APBD. BAG. UMUM
10	02.04.03.08.01 5	0001 s/d 0002	Jam Ukur (Meet Lock)	Seiko	-	Fiber	Pembelian	2013			Baik	2	1.000.000,00	Jam Dinding
11	02.04.03.08.01 5	0001 s/d 0002	Jam Ukur (Meet Lock)	Seiko	-	Fiber	Pembelian	2013			Rusak Berat	2	1.000.000,00	Jam dinding
12	02.04.03.08.02 4	0001 s/d 0002	Air Conditioning Unit	Panasonic	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	2	8.900.000,00	
13	02.04.03.08.02 4	0003	Air Conditioning Unit	Panasonic	-	fiber	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	4.450.000,00	
14	02.04.03.08.02 4	0001 s/d 0002	Air Conditioning Unit	Gree	-	fiber	Pembelian	2011			Baik	2	6.600.000,00	
15	02.04.03.08.02 4	0001 s/d 0002	Air Conditioning Unit	Low Watt	-	fiber	Pembelian	2011			Baik	2	6.600.000,00	
16	02.04.03.08.02 4	0008	Air Conditioning Unit	-	-	fiber	Pembelian	2011			Baik	1	3.300.000,00	
17	02.04.03.08.02 4	0001 s/d 0005	Air Conditioning Unit	LG / 2PK	bm17_dpm_0015	FIBER	Pembelian	2017			Baik	5	38.750.000,00	Air Conditioning Unit
18	02.04.03.08.02 4	0015	Air Conditioning Unit	LG / 2PK	bm17_dpm_0030	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	7.750.000,00	Air Conditioning Unit
19	02.06.01.01.00	0001	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	-	Besi	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	2.500.000,00	
20	02.06.01.01.00	0002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	TAF	Besi	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	2.500.000,00	

	2												
21	02.06.01.01.00 7	0001 s/d 0002	Mesin Ketik Elektronik	Brother	TAF	Fiber	Pembelian	2008		Rusak Berat	2	8.000.000,00	
22	02.06.01.02.01 1	0001 s/d 0004	Mesin Calculator	Casio	-	Fiber	Pembelian	2013		Rusak Berat	4	2.000.000,00	
23	02.06.01.03.00 7	0002	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Canon	-	Fiber	Pembelian	2015		Baik	1	9.000.000,00	
24	02.06.01.04.00 4	0001	Filling Besi/Metal	VIP	1	Besi	Pembelian	2007		Rusak Berat	1	79.950,00	

	NOMOR		SPESIFIKA	ASI BARANG				_	Ukuran		_		JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	02.06.01.04.004	0001 s/d 0006	Filling Besi/Metal	Awiko	-	Metal	Pembelian	2008			Rusak Berat	6	12.110.000,00	
26	02.06.01.04.004	0001 s/d 0002	Filling Besi/Metal	Apex	-	metal	Pembelian	2011			Baik	2	3.800.000,00	
27	02.06.01.04.004	0001 s/d 0006	Filling Besi/Metal	Apex	-	metal	Pembelian	2012			Baik	6	11.250.000,00	
28	02.06.01.04.004	0001 s/d 0005	Filling Besi/Metal	Korea	-	Metal	Pembelian	2013			Baik	5	8.500.000,00	
29	02.06.01.04.006	0001	Band Kas	Sentry safe	-	Besi	Pembelian	2015			Baik	1	10.650.000,00	BRANKAS
30	02.06.01.04.014	0001 s/d 0002	Lemari kayu	Tempahan	-	Kayu	Pembelian	2014			Baik	2	28.900.000,00	
31	02.06.01.05.002	0001 s/d 0002	Perkakas Kantor	NORDSON / ACCESS CONTROL DAN ELECTRIC BOLD LOCK	bm17_dpm_0016	BESI DAN FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	8.000.000,00	Perkakas Kantor
32	02.06.01.05.005	0001	Alat Penghancur Kertas	Paper Shredder	-	fiber	Pembelian	2011			Rusak Berat	1	2.300.000,00	
33	02.06.01.05.005	0002	Alat Penghancur Kertas	Paper Shredder/ZSA120 0DC	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	2.900.000,00	
34	02.06.01.05.006	0001	Papan Nama Instansi	Tempahan	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	1	700.000,00	
35	02.06.01.05.006	0002	Papan Nama Instansi	Tempahan	-	Stainless steel	Pembelian	2011			Rusak Berat	1	348.500,00	
36	02.06.01.05.006	0003	Papan Nama Instansi	PLANG KANTOR	bm17_dpm_0001	BESI	Pembelian	2017			Baik	1	12.000.000,00	Papan Nama Instansi
37	02.06.01.05.010	0001 s/d 0003	White Board	-	-		Pembelian	2011			Baik	3	1.190.000,00	
38	02.06.01.05.017	0001 s/d 0002	Mesin Absensi	ZKT ECO / BIOPAD 100	-	Plastik	Pembelian	2016			Baik	2	7.970.000,00	
39	02.06.01.05.028	0002	Overhead Projektor	Benq	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	4.900.000,00	
40	02.06.01.05.040	0001	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	-		Pembelian	2012			Baik	1	6.500.000,00	
41	02.06.01.05.040	0002	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	tempahan	-		Pembelian	2012			Baik	1	16.700.000,00	
42	02.06.02.01.001	0001 s/d 0003	Lemari Kayu	Lokal / Dua Pintu	-	Kayu	Pembelian	2007			Rusak Berat	3	239.850,00	
43	02.06.02.01.001	0001 s/d 0002	Lemari Kayu	Lokal / Tiga Pintu	-	Kayu	Pembelian	2008			Rusak Berat	2	2.160.000,00	
44	02.06.02.01.001	0006	Lemari Kayu	Super / Tiga	-	Kayu	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	1.080.000,00	
45	02.06.02.01.010	0001	Meja Rapat	Pintu Tempahan	-	kayu	Pembelian	2012			Baik	1	12.500.000,00	

	NOMOR		SPESIFIKA	SI BARANG				_	Ukuran		_		JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	02.06.02.01.017	0001	Meja Reseption	Tempahan	-	kayu	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	19.700.000,00	
47	02.06.02.01.017	0002	Meja Reseption	lokal / Tempahan	bm17_dpm_0031	Kayu	Pembelian	2017			Baik	1	132.940.000,00	Meja Reseption
48	02.06.02.01.030	0002	Kursi Putar	Crystal	-	Besi	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	79.950,00	
49	02.06.02.01.030	0001 s/d 0005	Kursi Putar	Frontline	-	besi/busa	Pembelian	2008			Rusak Berat	5	5.531.250,00	kursi kerja
50	02.06.02.01.030	0001 s/d 0020	Kursi Putar	Belgio	-	Busa	Pembelian	2015			Baik	20	11.350.000,00	
51	02.06.02.01.031	0001 s/d 0050	Kursi Biasa	Simco	-		Pembelian	2012			Baik	50	10.000.000,00	
52	02.06.02.01.031	0001 s/d 0002	Kursi Biasa	Belgio	bm17_dpm_0032	Besi dan Fiber	Pembelian	2017			Baik	2	2.000.000,00	Kursi Biasa
53	02.06.02.01.031	0051	Kursi Biasa	Belgio	bm17_dpm_0017	Besi dan Fiber	Pembelian	2017			Baik	1	1.000.000,00	Kursi Biasa
54	02.06.02.01.031	0052	Kursi Biasa	Belgio	bm17_dpm_0024	Besi dan Fiber	Pembelian	2017			Baik	1	1.000.000,00	Kursi Biasa
55	02.06.02.01.033	0001 s/d 0006	Bangku Tunggu	Kasindo / 3 Seat Stainless	bm17_dpm_0033	Stainless	Pembelian	2017			Baik	6	15.000.000,00	Bangku Tunggu
56	02.06.02.01.037	0001	Meja Komputer	Crystal	-		Pembelian	2007			Baik	1	760.000,00	
57	02.06.02.01.037	0002	Meja Komputer	O-Bis	-		Pembelian	2008			Baik	1	503.000,00	
58	02.06.02.01.037	0001 s/d 0002	Meja Komputer	-	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	2	478.000,00	
59	02.06.02.01.037	0001 s/d 0004	Meja Komputer	Olympic	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	4	956.000,00	
60	02.06.02.01.037	0001 s/d 0006	Meja Komputer	N6122	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	6	3.300.000,00	
61	02.06.02.01.048	0005	Meja Biro	1/2 Biro	-		Pembelian	2007			Rusak Berat	1	79.950,00	
62	02.06.02.01.048	0001 s/d 0002	Meja Biro	Vissi	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	2	1.400.000,00	
63	02.06.02.01.048	0001 s/d 0005	Meja Biro	Expo	-	Kayu	Pembelian	2011			Baik	5	6.500.000,00	
64	02.06.02.01.048	0001 s/d 0004	Meja Biro	LB	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	4	7.500.000,00	
65	02.06.02.01.049	0001	Sofa	Lokal	-	Busa	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	5.450.000,00	
66	02.06.02.01.049	0002	Sofa	Modu	-	Busa	Pembelian	2011			Baik	1	8.300.000,00	
67	02.06.02.01.049	0003	Sofa	Caroline	-	Busa Kayu	Pembelian	2013			Baik	1	12.000.000,00	
68	02.06.02.01.063	0001 s/d 0002	MOUBILER LAINNYA	ENGSEL DEXON DAN TEMPERED GLASS 12MM	bm17_dpm_0034	KACA DAN ALUMINIUM	Pembelian	2017			Baik	2	6.600.000,00	MOUBILER LAINNYA

	NOMOR		SPESIFIKA	SI BARANG					Ukuran		_		JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	02.06.02.01.064	0001	Karpet/Permadani	Tempahan	-	Baldu	Pembelian	2013			Baik	1	16.500.000,00	
70	02.06.02.03.001	0001	Mesin Penghisap Debu	Panasonic	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	1.900.000,00	
71	02.06.02.04.001	0001	Lemari Es	Panasonic	-	fiber	Pembelian	2011			Baik	1	2.600.000,00	
72	02.06.02.04.003	0001 s/d 0002	AC Unit	Sanyo	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	2	8.000.000,00	
73	02.06.02.04.003	0003	AC Unit	LG	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	5.300.000,00	
74	02.06.02.06.003	0001	Televisi	Polytron	-	Fiber	Pembelian	2008			Baik	1	1.850.000,00	
75	02.06.02.06.003	0002	Televisi	Polytron	-	Fiber	Pembelian	2010			Baik	1	1.380.000,00	
76	02.06.02.06.003	0005	Televisi	LG	-	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	7.900.000,00	LID P.APBD
77	02.06.02.06.003	0006	Televisi	Polytron	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	2.450.000,00	
78	02.06.02.06.003	0001 s/d 0002	Televisi	LG / 49LH511T	bm17_dpm_0035	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	20.000.000,00	Televisi
79	02.06.02.06.007	0008	Loudspeaker	CRAFT	bm17_dpm_0040	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	1.600.000,00	Loudspeaker
80	02.06.02.06.008	0001	Sound System	-	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	10.300.000,00	
81	02.06.02.06.039	0002	Dispenser	Arisa	-	fiber	Pembelian	2011			Rusak Berat	1	950.000,00	
82	02.06.02.06.039	0005	Dispenser	Arisa	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	1.500.000,00	
83	02.06.02.06.039	0006	Dispenser	ARISA	bm17_dpm_0018	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	1.900.000,00	Dispenser
84	02.06.02.06.049	0002	Handy Cam	Sony	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	1	5.400.000,00	
85	02.06.02.06.051	0001	Kain Gorden	Tempahan	-	Kain	Pembelian	2010			Baik	1	8.000.000,00	
86	02.06.02.06.052	0001 s/d 0029	Peralatan Gorden Lainnya	Tempahan	-	Alumunium	Pembelian	2013			Baik	29	12.180.000,00	
87	02.06.02.06.052	0002	Peralatan Gorden Lainnya	Tempahan	-	Fiber	Pembelian	2013			Baik	1	420.000,00	
88	02.06.03.02.001	8000	P.C Unit	-	TAF		Pembelian	2012			Rusak Berat	1	5.400.000,00	
89	02.06.03.02.001	0001 s/d 0002	P.C Unit	HP	-	FIBER	Pembelian	2013			Baik	2	13.600.000,00	KOMPUTER P.APBD
90		0009	P.C Unit	HP	-	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	6.800.000,00	KOMPUTER BUILT UP P.APBD
91	02.06.03.02.001	0010	P.C Unit	-	-	FIBER	Pembelian	2013			Baik	1	6.800.000,00	KOMPUTER P.APBD
92		0001 s/d 0002	P.C Unit	Нр	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	2	13.800.000,00	
93		0001 s/d 0002	P.C Unit	dell	-	fiber	Hibah	2018			Baik	2	23.059.174,00	PC (Hibah dari BKPM)
94	02.06.03.02.002	0002	Lap Top	Dell	-	fiber	Pembelian	2011			Baik	1	6.900.000,00	

	NOMOR		SPESIFIKA	ASI BARANG					Ukuran				JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	02.06.03.02.002	0001 s/d 0002	Lap Тор	Lenovo	-	Fiber	Pembelian	2013			Baik	2	15.800.000,00	
96	02.06.03.02.002	0001 s/d 0002	Lap Тор	Acer	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	2	15.100.000,00	
97	02.06.03.02.002	0001 s/d 0002	Lap Тор	Asus	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	2	14.550.000,00	
98	02.06.03.02.002	0009	Lap Тор	Asus	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	7.500.000,00	
99	02.06.03.03.006	0001 s/d 0005	СРИ	Power Up	TAF	Fiber	Pembelian	2008			Rusak Berat	5	27.500.000,00	
100	02.06.03.03.014	0001	Peralatan Komputer Mainframe	-	TAF		Pembelian	2010			Rusak Berat	1	12.480.000,00	
101	02.06.03.03.014	0002	Lain-lain Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	-	TAF		Pembelian	2011			Rusak Berat	1	11.000.000,00	
102	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	Canon	-	Fiber	Pembelian	2011			Baik	2	4.487.500,00	
103	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	Epson	-	Fiber	Pembelian	2011			Rusak Berat	2	4.487.500,00	
104	02.06.03.04.008	0001 s/d 0003	Printer	Canon	-	Fiber	Pembelian	2011			Rusak Berat	3	6.731.250,00	
105	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	CANON / MX 397	-	FIBER	Pembelian	2013			Baik	2	4.600.000,00	P.APBD
106	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	Epson	-	Fiber	Pembelian	2013			Baik	2	2.900.000,00	
107	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	Canon/mg2570	-	Fiber	Pembelian	2014			Baik	2	3.200.000,00	
108	02.06.03.04.008	0022	Printer	Canon	-	Fiber	Pembelian	2015			Rusak Berat	1	1.650.000,00	
109	02.06.03.04.008	0023	Printer	Canon	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	1.650.000,00	
110	02.06.03.04.008	0024	Printer	Canon	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	2.500.000,00	
111	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	CANON / PIXMA G2000	bm17_dpm_0003	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	4.590.000,00	Printer
112	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	CANON / PIXMA G2000	bm17_dpm_0010	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	4.590.000,00	Printer
113	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	CANON / PIXMA G2000	bm17_dpm_0012	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	4.590.000,00	Printer
114	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	HP / DESKJET GT 5810	bm17_dpm_0006	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	7.163.000,00	Printer
115	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	HP / DESKJET GT 5810	bm17_dpm_0013	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	7.163.000,00	Printer
116	02.06.03.04.008	0001 s/d 0002	Printer	HP / DESKJET GT 5810	bm17_dpm_0026	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	7.163.000,00	Printer

	NOMOR		SPESIFIK	ASI BARANG					Ukuran				JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	02.06.03.04.008	0001 s/d 0003	Printer	CANON / PIXMA	bm17_dpm_0036	FIBER	Pembelian	2017			Baik	3	6.885.000,00	Printer
118	02.06.03.04.008	0001 s/d 0004	Printer	G2000 HP / DESKJET GT 5810	bm17_dpm_0019	FIBER	Pembelian	2017			Baik	4	14.326.000,00	Printer
119	02.06.03.04.008	0039	Printer	CANON / PIXMA	bm17_dpm_0025	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	2.295.000,00	Printer
120	02.06.03.04.008	0045	Printer	G2000 Brother	-	Fiber	Hibah	2018			Baik	1	3.340.826,00	Printer (Hibah dari BKPM)
121	02.06.03.04.015	0001 s/d 0010	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Red star	TAF		Pembelian	2008			Rusak Berat	10	200.000,00	,
122	02.06.03.05.002	0001	Monitor	Samsung	TAF	fiber	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	3.300.000,00	
123	02.06.03.05.002	0001 s/d 0004	Monitor	Samsung	TAF	Fiber	Pembelian	2008			Rusak Berat	4	13.200.000,00	
124	02.06.03.05.002	0007	Monitor	Samsung	-	Fiber	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	3.500.000,00	
125	02.06.03.05.010	0001	Peralatan Personal Komputer	Logitech	-		Pembelian	2007			Rusak Berat	1	25.000,00	
126	02.06.03.05.010	0001 s/d 0006	Lain-lain Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Logitech	TAF		Pembelian	2008			Rusak Berat	6	100.000,00	
127	02.06.03.05.010	0008	Peralatan Personal Komputer	CCTV	bm17_dpm_0020	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	26.000.000,00	Peralatan Personal
128	02.06.03.06.006	0001	Lain-lain Peralatan Jaringan Lain-lain	-	-		Pembelian	2015			Baik	1	174.000.000,00	Komputer Lain-lain Sistem Informasi dan Database Perizinan
129	02.06.04.01.004	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal	-	Fiber	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	79.950,00	
130	02.06.04.01.005	0002	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Minnoti	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	1	6.480.000,00	
131	02.06.04.01.006	0001 s/d 0006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2008			Rusak Berat	6	4.332.000,00	
132	02.06.04.01.008	0001 s/d 0002	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Expo	-	Kayu	Pembelian	2011			Rusak Berat	2	2.260.000,00	
133	02.06.04.01.008	0001 s/d 0024	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Expo	-	Kayu	Pembelian	2011			Baik	24	27.170.000,00	
134	02.06.04.03.004	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal	-	Busa	Pembelian	2007			Rusak Berat	1	79.950,00	
135	02.06.04.03.004	0001 s/d 0011	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal	-	fiber/Busa	Pembelian	2011			Baik	11	6.732.000,00	
136	02.06.04.03.004	0001 s/d 0019	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	-	fiber	Pembelian	2011			Baik	19	13.628.000,00	
137	02.06.04.03.005	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	620 Direktur	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	1	1.750.000,00	
138	02.06.04.03.008	0001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Sinergy Office Chair	bm17_dpm_0009	Besi dan Fiber	Pembelian	2017			Baik	1	1.000.000,00	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

	NOMOR		SPESIFIKA	ASI BARANG					Ukuran		_		JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	02.06.04.03.008	0001 s/d 0004	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Sinergy Office	bm17_dpm_0037	Besi dan	Pembelian	2017			Baik	4	4.000.000,00	Kursi Kerja Pegawai
140	02.06.04.03.008	0001 s/d 0008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chair Sinergy Office Chair	bm17_dpm_0027	Fiber Besi dan Fiber	Pembelian	2017			Baik	8	8.000.000,00	Non Struktural Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
141	02.06.04.03.008	0001 s/d 0027	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Sinergy Office Chair	bm17_dpm_0021	Besi dan Fiber	Pembelian	2017			Baik	27	27.000.000,00	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
142	02.06.04.06.008	0001 s/d 0003	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Tiga Kursi	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	3	4.950.000,00	
143	02.06.04.06.008	0001 s/d 0004	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	-	-	Stainless steel	Pembelian	2011			Baik	4	6.000.000,00	
144	02.06.04.07.006	0001	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	1	1.000.000,00	
145	02.06.04.07.006	0001 s/d 0002	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	kayu	Pembelian	2008			Rusak Berat	2	2.000.000,00	
146	02.06.04.07.006	0001 s/d 0002	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-		Pembelian	2011			Baik	2	2.900.000,00	
147	02.06.04.07.006	0001 s/d 0002	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Super	-	Kayu	Pembelian	2011			Baik	2	2.900.000,00	
148	02.06.04.07.006	0001 s/d 0006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	SUPER	-	kayu	Pembelian	2012			Baik	6	10.350.000,00	
149	02.06.04.07.006	0001 s/d 0003	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Super	-	Kayu	Pembelian	2013			Baik	3	5.692.500,00	
150	02.07.01.01.052	0001 s/d 0002	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	-	Fiber	Pembelian	2011			Rusak Berat	2	2.100.000,00	
151	02.07.01.01.052	0001 s/d 0007	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	-	fiber	Pembelian	2012			Rusak Berat	7	7.647.500,00	
152	02.07.01.01.052	0012	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	-	FIBER	Pembelian	2013			Rusak Berat	1	1.000.000,00	P.APBD
153	02.07.01.01.052	0001 s/d 0002	Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA	-	Fiber	Pembelian	2014			Rusak Berat	2	2.100.000,00	
154	02.07.01.02.003	0001	Camera Electronic	Samsung	-	Fiber	Pembelian	2013			Baik	1	4.500.000,00	
155	02.07.01.02.003	0001 s/d 0005	Camera Electronic	Sony	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	5	19.280.000,00	
156	02.09.01.06.053	0001	Screen	Accer	-	Fiber	Pembelian	2013			Baik	1	3.400.000,00	Layar Infokus
157	02.09.01.06.053	0001 s/d 0003	Screen	SAMSUNG	-	FIBER	Pembelian	2013			Baik	3	6.000.000,00	P.APBD
158	02.09.01.06.053	0004	Screen	Ben Q	-	FIBER	Pembelian	2013			Rusak Berat	1	2.000.000,00	P.APBD
159	02.09.01.15.028	0001	Stabilizer	Matsugawa	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	1	1.483.000,00	
160	02.09.01.15.028	0006	Stabilizer	-	-		Pembelian	2008			Rusak Berat	1	1.485.000,00	
161	02.09.01.47.062	0001	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0002	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	5.040.260,87	Personal Komputer

	NOMOR		SPESIFI	KASI BARANG					Ukuran		_		JUMLAH	
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	02.09.01.47.062	0001 s/d 0002	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0007	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	10.080.521,74	Personal Komputer
163	02.09.01.47.062	0001 s/d 0002	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0011	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	10.080.521,74	Personal Komputer
164	02.09.01.47.062	0001 s/d 0002	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0028	FIBER	Pembelian	2017			Baik	2	10.080.521,74	Personal Komputer
165	02.09.01.47.062	0001 s/d 0003	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0038	FIBER	Pembelian	2017			Baik	3	15.120.782,61	Personal Komputer
166	02.09.01.47.062	0001 s/d 0004	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0023	FIBER	Pembelian	2017			Baik	4	20.161.043,48	Personal Komputer
167	02.09.01.47.062	0001 s/d 0005	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0014	FIBER	Pembelian	2017			Baik	5	25.201.304,35	Personal Komputer
168	02.09.01.47.062	0002	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0004	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	5.040.260,87	Personal Komputer
169	02.09.01.47.062	0003	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0005	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	5.040.260,87	Personal Komputer
170	02.09.01.47.062	0006	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0008	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	5.040.260,87	Personal Komputer
171	02.09.01.47.062	0014	Personal Komputer	HP / ALL IN ONE 20-C005D	bm17_dpm_0022	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	5.040.260,86	Personal Komputer
172	02.09.02.02.008	0001	Papan Bergerak	RUNNING TEXT	bm17_dpm_0039	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	15.000.000,00	Papan Bergerak
173	03.11.01.01.001	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2011	300	M2	Baik	1	2.038.181.464,55	
174	05.17.01.01.010	0001	Buku Umum Lain-lain	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	3.230.000,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total	3.853.089.814,55	

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menggunakan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti telah memiliki bangunan tersendiri, adanya ruang pelayanan (front office dan back office), ruangan pengaduan, tempat menyusui dan bermain anak. Pelayanan perizinan meliputi pelayanan online untuk semua jenis pelayanan perizinan, juga telah dilengkapi dengan integrasi sistem dengan lembaga/instansi terkait, sampai dengan pemohon cetak izin sendiri. Tetapi ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang karena beberapa keadaan rusak seperti AC, komputer, laptop dan printer.

# 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Dari tabel dibawah terlihat bahwa jumlah Investor PMA bersifat fluktuatif dan tertinggi di tahun 2018, di Tahun 2020 tidak ada PMA yang menanamkan investasinya ke Kota Binjai dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk Investor PMDN tertinggi terdapat di Tahun 2020 hal ini dikarenakan makin mudahnya untuk pengurusan izin yang terdapat di OSS sehingga pelaku usaha dapat mendaftarkan izinnya secara mandiri. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai investasi bersifat fluktuatif dimana ada kenaikan dan penurunan tetapi di tahun 2020 terdapat peningkatan yang sangat baik dibandingkan di tahun 2019.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kota Binjai

NO	Indikat or kinerja	Targ et NSP	Target IKK	Targ et Indi	Target F	Renstra Po	erangkat 1	Dаега <b>h</b> Та	hun ke-		Realisa	si Capaian 🤈	rahun ke-		Ras	io Caj	paian ke-		tahun
	Sesuai Tugas dan Fungsi Perang kat Daerah	K		kato r Lain nya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	20 16	20 17	20 18	20 19	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	[11]	(12)	(13)	(14)	(15)	[16	[17	(18	(19	(20)
1	Jumlah I nvestor		580		512	550	560	570	580	514	398	440	782	990	10 0%	72 %	79 %	10 0%	100 %
	Jumlah Nilai Investasi		89.000.00 000		86.245.550 492	1	88.000.000 000	89.000.00 ).000	89.000.00 0.0000	86.245.50. 192 +USS\$ 77.000.000	80.811.50 0.000	814.301.91 ).159	512.708. 815.974	916.408.7 95.440	.00	93 %	925 6	376 6	1.030 %
3	Jumlah Perizina n		3.275		1.200	2.300	2.400	3.275	3.385	1.250	1.952	2.073	2.869	3.275	6	85 %	86 %	88%	97%
	Nilai Survey Kepuasa n		85		75	75	80	85	85	73	75	81.5	81.5	81.75	97%	100 %	100 %	96%	96%

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	[4]	(5)	Anggar an	Realis asi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(!4)	(!5 )	(!6 )	(17)	(18)
Urusan Wajib	1.122. 214.3	4.323. 775.58	2.769. 468.1	933.4 44.00	1.226 .479.	1.073.73 0.500	2.875. 163.04	1.753. 250.30	837.80 7.792	1.108.7 39.942	95, 7%	66%	63%	90 %	90 %	1.865.3 10.400	1.529. 738.3
(Penanam an Modal)	80	0	58	0	380		6	6									17

# 2.4 Tantangan dan Peluang

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayan perizinan dan nonperizinan. Untuk menentukan Strategi Organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja.

## A. Faktor Internal Faktor-faktor yang mempengaruhi:

# 1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Adanya struktur organisasi yang jelas;
- c. Adanya tupoksi yang jelas yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- e. Karena telah menggunakan sistem berbasis Online yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus Perizinan;
- f. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan;
- g. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan;
- h. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.

# 2. Kelemahan (Weakneses)

- a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara;
- b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai;
- c. Masih kurangnya promosi promosi dalam bentuk pameran investasi;
- d. Tim teknis masih berada di OPD terkait.

#### B. Analisa Lingkungan Eksternal

- 1. Faktor-Faktor Kekuatan (Strengths)
  - a. Kebijakan-kebijakan yang menaungi dari pusat (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dan Perka BKPM Nomor 9 tahun 2012);
  - b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
  - d. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin dengan mudah dan cepat.
- 2. Faktor-faktor Kelemahan (Weakneses)
  - a. Minat investor asing yang belum begitu besar;
  - b. masih banyak belum dibuatnya aturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat dalam menyikapi kebijakan perizinan di daerah.

#### 3. Faktor-Faktor Tantangan (Threats):

- a. Perlunya koordinasi dengan SKPD teknis yang lebih intensif sehingga prosedur perizinan yang tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilaksanakan;
- b. Perlunya pemahaman peraturan Perundang-Undangan dan penguasaan teknologi dikarenakan perubahan sistem perizinan dan non yang sangat cepat.
- c. Masyarakat masih enggan mengurus izin karena masih mengganggap pengurusan izin masih berbelit dan berbiaya tinggi.

Faktor-Faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD tersebut ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, sebagai berikut:

- 1. Faktor Penghambat:
- 1.1 Terbatasnya jumlah SDM Aparatur untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan yang baik.
- 1.2 Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

- 2. Faktor Pendorong:
- 2.1 Adanya motivasi yang tinggi dari staf pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) dan tetap berupaya meningkatkan kinerja danprofesionalisme;
- 2.2 Adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
- 2.3 Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga dapat mendorong kinerja pelayanan perizinan yang lebih baik;
- 2.4 Adanya sistem pelayanan One Stop Service (satu pintu).

#### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

## 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

#### 3.1.1 Permasalahan yang dihadapi/kondisi umum saat ini

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

- 1. Masih kurangnya koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait;
- 2. Belum adanya regulasi penanaman modal di daerah;
- 3. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan;
- 4. Masih kurangnya pameran investasi;
- 5. Masih kurang lengkapnya peraturan daerah terkait perizinan;
- 6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setelah dilakukan kaji-ulang, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Binjai menjadi :

#### 3.1.2 Kondisi yang diinginkan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka dalam waktu kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai akan berusaha untuk mengatasi permasalahan kepada masyarakat umum, dunia usaha dalam hal mendapatkan izin usaha diantaranya:

- 1. Mencegah sejak dini terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan.
- 2. Mengurangi beban administrasi karena pelayanan yang lebih efektifdan efisien, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dengan pelayanan publik pemerintah dan akan bersedia mengurus izin yangdiperlukan.

3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

## 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Visi pembangunan Kota Binjai adalah "MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS".

Visi pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026, ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005- 2025

Penjelasan Makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalanannya waktu, Kota Binjai harus terus mju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
- 2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai nilai dan norma norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azasm taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga terciptanya masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai Kota maju dibanding daerah lainnya.
- 3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat.

Misi: Untuk mewujudkan Visi "MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS" dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional;
- 2. Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang bewawasan lingkungan;
- 3. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

## 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efesien, Melayani dan Profesional

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efesian, melayani dan dapat dipercaya dalam mengembang amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sisitem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing – masing.

#### 2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastuktur) dan penunjangannya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdangangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untum menimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada.

## 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul khrimah.

#### 3.2.1. Program Prioritas Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Terpilih

Adapun program prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai terpilih sesuai dengan Misi sebagai berikut :

#### MISI 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efesien, Melayani dan Profesional

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah :

- 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
- 2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan;
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
- 4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (the right man on ther right place).

#### MISI 2: Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain :

- 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata;
- 2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- 3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- 4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;

- 5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal;
- 6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif;
- 7. Peningkatan penegakan hukum lingkungan.

# MISI 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
- 2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, saran penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- 4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- 5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
- 6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan masyarakat.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN tahun 2005 - 2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi, Misi dan Arahan Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh)

pembangunan. Dalam hal ini, BKPMmendukung pembangunan Nomor 1 yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan "Meningkatnya Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Nilai Tambah, Perekonomian" yang akan dicapai melalui arah kebijakan "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi" dan strategi "Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan". Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan

- dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Sejalan dengan yang telah disampaikan sebelumnya, Sasaran Strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
- SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.
- SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

#### Renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Utara

Berdasarkan telaahaan Renstra OPD DIPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara di bidang Penanaman dan Perizinan dapat dilihat bahwa strategi mencapai

tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi yang diakomodir dari pakar kebijakan publik yaitu dengan menggunakan "Metode Analisis SWOT secara internal dengan menerapkan comperative advantage stategy untuk mengantisipasi kekuatan yang dihadapkan pada kelemahan dengan menerapkan pendekatan mobilization untuk mengantisipasi peluang (opportunity) dihadapan strategy (threats) dari kondisi lingkungan strategis yang tantangan/ancaman merupakan kondisi internal. Adapun Sasaran Strategis DISPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah sebagai berkut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis DISPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja
1	Meningkatnya iklim penanarnan modal dalam	• Perbaikan kemudahan
	rangka peningkatan daya saing penanaman	memulai berusaha
	modal	• Penyederhanaan bisnis
		proses perizinan
		investasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman	• Indeks Kepuasan
	modal yang prima dan responsive dalam	Masyarakat atas kualitas
	rangka peningkatan daya saing penanaman	perizinan
	modal	Jumlah Perizinan dan non
		perizinan yang diterbitkan
		dalam waktu yang singkat
3	Meningkatnya kinerja lembaga melalui	Kategori LAKIP
	ketersediaan sarana, prasarana dan aparat	• Indeks Kualitas
	dalam rangka menunjang dan fungsi	Pelayanan
	DISPMPPTSP	
4	Meningkatkan realisasi penanaman modal	• Realisasi Investasi
	melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan	Penanaman Modal
	pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Rasio PMDN
	dalam rangka peningkatan daya saing	
	penanaman modal	
5	Meningkatkan daya tarik penanaman modal	• Jumlah Rencana
	melalui promosi terpadu dan efektif bagi	Investasi

	penanaman modal dan luar negeri yang	• Jumlah Investasi
	berpijak pada peningkatan daya saing	
	penanaman modal	
6	Meningkatkan kerjasama internasional untuk	• Jumlah kesepakatan
	mendorong investasi dan melindungi	/perjanjian penanaman
	kepentingan nasional dalam rangka	modal
	peningkatan daya saing penanaman modal.	

Dalam mendukung sasaran strategis DISPMPPTSP tersebut terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DISPMPPTSP.

#### Faktor pendorong:

- 1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan;
- 2. Tersedianya aplikasi SPIPISE;
- 3. Tersedianya fasilitas promosi investasi.

#### Faktor penghambat:

- 1. Pemprosesan perizinan yang masih bergantung kepada dinas teknis
- 2. Belum adanya SOP Perizinan sesuai jumlah pendelegasian perizinan kepada DISPMPPTSP;
- 3. Belum adanya peta potensi investasi provinsi Sumatera Utara;
- 4. Belum adanya regulasi penanaman modal;
- 5. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi perizinan;

Langkah-langkah OPD DISPMPPTSP Provsu dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai *event* pameran promosi baik di dalam maupun luar negeri;
- Mendorong Kab/Kota dan Instansi terkait di Sumatera Utara untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing;
- c. Menginisasi rencana penyusunan rancangan Perda tentang pemberian kemudahan dalam penanaman modal dan perizinan;
- d. Membuat SOP perizinan sektor yang didelegasikan ke DISPMPPTSP.

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan rencana tata ruang wilayah diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan secara umum menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta kawasan strategis untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

#### 3.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kota Binjai meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk.

#### 3.4.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Binjai menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

Berdasarkan penuturan para orang tua yang dianggap mengetahui asal mula timbulnya Binjai, yang saat ini menjadi Kota Binjai, dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Bingai.

Binjai sebenarnya adalah nama suatu pohon besar, rindang, tumbuh dengan kokoh di tepi sungai Bingai yang bermuara di Sungai Wampu. Pada Tahun 1823 Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama Ba Bingai (menurut buku Mission to The Eastcoast of Sumatera-Edinburg Binjai 1826). sejak Tahun 1822, Sebenarnya telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar Ketapangai (Pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/Damai.

Perkembangan zaman terus berjalan, pada tahun 1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J.Nienkyis dan 1866 didirikan Deli Maatschappij. Usaha untuk menguasai Tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkecuali dengan menggunakan politik pecah

belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdanmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Dibawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat Benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Dengan tindakan datuk Sunggal ini Belanda merasa terhina dan memerintahkan Kapten Koops untuk menumpas para Datuk yang menentang Belanda. Dan pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan para datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie No.12 dimana Binjai dijadikan Gemeente dengan luas 267 Ha. Pada tahun 1942–1945 Binjai di bawah pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagujawa dengan sebutan Gunserbu dan tahun 1944/1945 Pemerintahan Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif J.Runnanbi dengan anggota Dr.RM. Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Pada Tahun 1945 (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM.Ibnu dan pada 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional dan pada masa pendudukan Belanda 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bunger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai pada tahun 1948–1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC Moree. Tahun 1950–1956 Binjai menjadi Kota Administratif.

Kabupaten Langkat dan sebagai Wali Kota adalah OK. Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953–1956. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom Kotapraja dengan Wali Kota pertama S.S. Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10

Tahun 1986 wilayah Kota daerah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 Km2 dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 19 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 desa persiapan dan 1 kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146/2624/SK/ 1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

Secara administratif Pemerintah Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- ✓ Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
- ✓ Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
- ✓ Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan yaitu :

- 1. Kecamatan Binjai Kota, yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
  - a. Kelurahan Setia
  - b. Kelurahan Satria
  - c. Kelurahan Tangsi
  - d. Kelurahan Binjai
  - e. Kelurahan Pekan Binjai
  - f. Kelurahan Berngam
  - g. Kelurahan Kartini
- 2. Kecamatan Binjai Barat, yang terdiri-dari atas 6 (enam) kelurahan yaitu:
  - a. Kelurahan Limau Mungkur
  - b. Kelurahan Suka Ramai

- c. Kelurahan Suka Maju
- d. Kelurahan Payaroba
- e. Kelurahan Limau Sundai
- f. Kelurahan Bandar Senembah
- 3. Kecamatan Binjai Timur, yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu :
  - a. Kelurahan Timbang Langkat
  - b. Kelurahan Mencirim
  - c. Kelurahan Tanah Tinggi
  - d. Kelurahan Dataran Tinggi
  - e. Kelurahan Tunggurono
  - f. Kelurahan Sumber Mulyo Rejo
  - g. Kelurahan Sumber Karya
- 4. Kecamatan Binjai Selatan, yang terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu:
  - a. Kelurahan Rambung Barat
  - b. Kelurahan Rambung Timur
  - c. Kelurahan Rambung Dalam
  - d. Kelurahan Binjai Estate
  - e. Kelurahan Tanah Merah
  - f. Kelurahan Tanah Seribu
  - g. Kelurahan Pujidadi
  - h. Kelurahan Bhakti Karya
- 5. Kecamatan Binjai Utara, yang terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan yaitu :
  - a. Kelurahan Jati Negar
  - b. Kelurahan Jati Karya
  - c. Kelurahan Jati Makmur
  - d. Kelurahan Jati Utomo
  - e. Kelurahan Nangka
  - f. Kelurahan Pahlawan
  - g. Kelurahan Kebun Lada
  - h. Kelurahan Damai
  - i. Kelurahan Cengkeh Turi

Dari beberapa Kecamatan yang ada di Kota Binjai Kecamatan Binjai Selatan memiliki wilayah yang paling luas sebesar 29.96 Km², sedangkan Kecamatan Binjai Kota memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 4.12 Km².

#### 3.4.2. Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan *geosrategic* nasional yang terdapat dalam wilayah Kota Binjai adalah kawasan Brimob dan Arhanud SE-11BS di Kecamatan Binjai Timur.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Binjai.

#### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh

Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Tahun 2021-2026. Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut:

#### (1) Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN

Sesuai dengan visi dan misi dan tujuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2021-2026 dimana Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ingin menjamin iklim investasi yang kondusif khususnya bagi perkembangan industri jasa dan perdagangan. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dimana Peraturan Daerah tersebut dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang dapat meningkatkan PMA dan PMDN di Kota Binjai.

#### (2) Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang cepat dan berkelanjutan dari Tingkat Pusat mengenai Perizinan dan Non Perizinan, maka diperlukan aparatur yang adaptif dan cekatan untuk memahami setiap perkembangan peraturan Perundang-Undangan tersebut dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sumber Daya Aparatur merupakan aset Strategis dalam kerangka perwujudan pelayanan perizinan yang prima dan berkualitas. Untuk itu perlu mewujudkan budaya kerja aparatur yang menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali tujuan aparatur sebagai pelayan masyarakat dan aparatur juga harus mengerti/ paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan kinerja aparatur tersebut dapat tercapai secara prima.

#### (3) Sarana dan Prasarana

Untuk mewujukan kinerja aparatur yang prima dan maksimal perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Sarana dan prasarana antara lain Gedung Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional.

#### (4) Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang minim

Belum efektifnya kegiatan promosi penanaman modal untuk mendorong peningkatan kerjasama investasi dan realisasi investasi daerah, hal ini dikarenakan masih minimnya anggaran/dana yang diberikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga kegiatan promosi penanaman modal tidak dapat terlaksana.

Setelah dilakukan kaji-ulang, Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi :

Tabel 3.2 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu Strategis:	Penjabaran:
1 Kurangnya kompetensi aparatur dalam penggunaan aplikasi investasi;	Masih adanya ASN yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi investasi/perizinan
2 Realisasi investasi masih terbatas;	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk meningkatkan iklim dan minat investasi, sehingga Kota Binjai belum mampu menjaring investasi secara optimal
3 Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi;	Masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan perkembangan investasi yang berjalan secara kontinyu, sehingga perkembangan realisasi investasi belum dapat diketahui secara pasti
4 Kurangnya informasi terkait potensi investasi;	Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan peta potensi investasi di Kota Binjai, sehingga produk yang berkaitan dengan informasi potensi investasi sulit didapatkan masyarakat/investor
5 Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	Belum terjalin secara optimal sinergi antar pemangku kepentingan di Kota Binjai untuk menyelesaiakan masalah terkait investasi

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai misi pertama "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional" dalam pembangunan Kota Binjai dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan dari pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat;

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai

Visi: Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	No	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	1	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026

## VISI: "MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS" MISI: "MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFESIEN, MELAYANI DAN PROFESIONAL"

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /	SATUAN	AWAL TAHUN PERENCANAAN		1	ΓARGET			KONDISI AKHIR
			SASARAN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi	Meningkat nya kualitas tata kelola pemerinta han	Jumlah Investor PMA/PMDN  Jumlah Investor PMA	Buah Buah	0	2	3	4	4	5	5
	masyarakat		Jumlah Investor PMDN	Buah	990	1.008	1.027	1.036	1.045	1.045	1.045

	Nilai Investasi PMA/PMDN								
	Jumlah Nilai Investasi PMA (dalam milyar rupiah)	Rupiah	0	5,2	5,4	5,6	5,8	6	6
	Jumlah Nilai Investasi PMDN (dalam milyar rupiah)	Rupiah	916	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Perizinan	Buah	3.275	3.500	3.640	3.780	3.930	4.085	4.085
	Lama Pengurusan Perizinan melalui OSS	Hari	7 hari setelah berkas lengkap	7 hari setelah berkas lengkap	7 hari setelah berkas lengkap	6 hari setelah berkas lengkap	6 hari setelah berkas lengkap	5 hari setelah berkas lengka p	5 hari setelah berkas lengkap
	Lama Pengurusan Perizinan melalui E-	Hari	21 hari setelah berkas lengkap	21 hari setelah berkas lengkap	21 hari setelah berkas lengkap	20 hari setelah berkas lengkap	20 hari setelah berkas lengkap	19 hari setelah berkas lengka	19 hari setelah berkas lengkap

Perizinan							p	
Survey Kepuasan Masyarakat	Interval	81.75	85	87	88	89	90	90
Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan	Laporan	80	82	85	87	88	90	90
Indikator Rasio Tenaga Kerja PMA/PMDN	%	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,0

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/	SATUAN	Data Awal		INDIKA	TOR TUJ	UAN/ SA	SARAN	
INO	IOSOAN	SASAKAN	SASARAN	INDIKATOR	(2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat		Meningkatnya Investasi	Persen	-	-	-	-	3	3	3
2.		Meningkatnya profesionalitas layanan perizinan	Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission)	Hari (setelah berkas lengkap)	8	7	7	6	6	5	5
3			Lama Pengurusan Perizinan Melalui e- Perizinan	Hari (setelah berkas lengkap)	21	21	21	20	20	19	19

#### BAB V

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi Pembangunan Kota Binjai periode Tahun 2021-2026

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi (Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan).

Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law) bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Sesuai Strategi Pembangunan Kota Binjai tersebut dan juga tujuan serta sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat dirumuskan bahwa Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai menghadapi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi yaitu :

- a. Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten,cekatan dan professional.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik dengan mendorong penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP), meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan.

#### 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kota Binjai yang terhubung dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional;
- 2. Menyediakan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik;
- 3. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai;

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dimana Peraturan Daerah tersebut dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya yang dapat meningkatkan PMA dan PMDN di Kota Binjai;
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi;
- 3. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi;
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 5. Optimalisasi penerapan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan publik

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

#### VISI: "MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS"

#### MISI: "MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, MELAYANI DAN PROFESIONAL"

TUJUAN	SASARAN	NO.	STRATEGI	NO.	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi (Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan).	1.	Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.
efisien bagi masyarakat		2.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	1.	Menyediakan layanan perizinan yang responsif, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik
				2.	Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai

## Setelah dilakukan kaji-ulang, Tabel 5.1 direvisi menjadi :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	" MEWUJUDKAN BINJA	AI YANG LEBIH MAJU, I	BERBUDAYA DAN RELIGIUS "
MISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	2. Meningkatkan infrasti bewawasan lingkungan	ruktur pertumbuhan ekoi ;	n yang efektif, efisien, melayani dan profesional; nomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang yarakat Kota Binjai yang berkualitas.
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Meningkatnya profesionalitas layanan perizinan	Mempermudah akses pengurusan izin	Menyediakan layanan perizinan yang mudah diakses oleh masyarakat (melalui layanan OSS, dapat diakses melalui perangkat komputer/android)
		Meningkatkan kualitas layanan perizinan	Menyediakan layanan perizinan yang responsif, gratis, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara online
		Meningkatkan kualitas SDM	Memberikan pendidikan/pelatihan bagi ASN dan Non ASN

#### BAB VI

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada tahun Renstra 2021-2026 direncanakan pelaksanaan 6 (enam) program dengan 13 (sebelas) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) sub kegiatan. Rencana ini diperoleh dari hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program ini didukung oleh 7 ( tujuh ) kegiatan yaitu :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pengadaan Mebel;

- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
     Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pemeliharaan Mebel;
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya.

#### 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kabupaten / Kota

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

#### 3 Program Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

- 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4 Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

#### 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

#### 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu :

 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 6.1

Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

Tahun 2021-2026

						2021		2022		2023		2024		2023		2026		2026		T
					т	R <sub>0</sub>	т	Po Po	т	P <sub>0</sub>	т	Po Po	т	Pp	т	Po Po	т	Pp		—
Ш	RI	Ы	MI.	ÞΙ		jėj j	PI	PI	RI	1101	111	[12]	اداا	[14]	ונון	[16]	[17]	[12]	11.41	20
contraction contra	Menogkanya kualiian isia kelola pemenoiahan	2:18:01	PROGRAM PENNEMANA URUSAN PENSERINTARAN BAIRAR KASUPATENI KOTA	Calcupus program penunjung urum pemerintah daerah kabupaten/kota		4.004.321.039		5.918.025.000		6.042.140.000		6.294.950.000		6.526.050.000		6.795.770.000		21.587.925.000	OPMPTSP	Каз Вој
anano an yang dani dan		2 13 01 2.01	Percocaca, Peogacgarao, das Evaluas Kucena Peraogka Cacas			7.386.900		13,900,000		16 320 000		17.130.000		17.300.000		19 220 000		85.720.000	OPMPT&P	Казво
क्ष्यक्रम् क्ष्यक्रम्	Ϊ	2 13 01 2 01 01	Pකාදයකයන වන්සෙනක Percensum Persogia වනයන්	कर प्रदास के क्षेत्रकार प्रमुख्या के क्षेत्रकार	l Ookumen	7 286 900	I Odvomen	7.900.000	 	3 200 000	I Dakuman	9 200 000	1 0 aku aa aa	000.000	l Ookvaca	000 DOO	3 Odkumen	42 400 000	ориртър	Kas Bo
		2 13 01 2 01 06	Koordioso dan Posyusuoso Laporan Capasa Kinorja SKPO	Jumisis वेळ्यकटा पुरस्कृतिकाम्बर्ध	0		l Odkumen	3 100 100	l Dakuman	3 750 000	I Dakuman	9 770 000	I Dakum	9 DOO DOO	l Dakuman	000 06C P	3 Oakuma	43.220.000	ориртър	Казва
		2   3 0  2 02 2   3 0  2 02 0	Administrati Kousense Porsekka Daerak Posyedisaa Gaji dan Tunjangan ASA	Torozdisova gaji dao iuojaogao yaog	l Tabus	3.943.033.2331 3.247.232.231	l Tabus	4.239.300.000 4.130.000.000	l Tabus	4.429.220.000	l Tabus	4 200 000 000	12 Bulso	4.793.700.000 4.670.000.000	l Tabus	4.379.200.000 4.230.000.000	3 Tabus	23 483 000 000		Kona Dir Kona Dir
		2 13 01 2 02 04	Koordinaan dan Polaksanaan Akuniansi SKPO	Jumisi dakuman	l Tabus	97.233.000	l Tabus	101 200 000	l Tabus	106 000 000	l Tabuo	110 000 000	l Tabus	113,000,000	l Tabus	121 000 000	3 Tabus	223 200 000	ориртър	Kas Br
		2 13 01 2 02 03	Koordioso dae Posyusuose Laperse Kousegae Akhir Tahue SKPO	Jumpa datuman yang disusun	0	0	l Dakuman	3 100 100		3 320 000	l Dakuman	9 700 000	I Dakuasi	3.700.000	I Dakumo	3 200 000	3 Ookumen	42.320.000	ориртър	Kana Ba
	1	2 13 01 2 03	Administrato Koncovisias Portugica Darrio		п			130 000 000		136,000,000		162 000 000		000.000.561		173 000 000		311,000,000	приртър	Казва
		2 13 01 2 03 02	Prografiano Pakisiano Ciroso Biccoma Almburi Kolongkiapano ya	Jumish pakaran dinas dan kelengkapanga	0	0	40 m	20 000 000	42 m	32 000 000	42 m	24 000 000	<b>4</b> 2 <b>m</b>	36 000 000	42 m	29 000 000	203 ==	270 000 000		Казва
		2 13 01 2 23 09	Peodulukan dan Pelankan Pegawa Berdasarkan Tugas dan Punga	Jumish pagawa yang mangkun dikis	0	0	l Tabus	100.000.000	l Tabus	104 000 000	l Tabus	103.000.000	l Tabuo	112,000,000	l Tabus	117,000,000	3 Tabus	541 ,000 ,000	ориртър	Казва
	l	2 13 01 2 06	Administrate Umum Porteckia Darrah			294 282 200		392 623 000		303,700,000		323 400 000		346.230.000		363.120.000		2.732.293.000	ориртър	Каз Во
		2 18 01 2 06 01	Proyectione Komponen Innalise Linn's / Processings George George Komponen	Torodiseya Yasepasco ionalas Ironk/pascrasgas galuog kasiar	i Tabuo	2 000 000	l Tabus	3 200 000	l Tabus	2 400 000	i Tabus	2 400 000	l Tabus	2 200 000	i Tabuo	9 200 200	3 Tabus	28 030 000	ориртър	Казво
		2 13 01 2 06 02	Posyediana Peralama dan Perlengkapan Kanior	Jumisis perlengkapan yang dibulukkan	0	0	l Tabuo	230 000 000	l Tabus	120 000 000	l Tabus	136,000,000	l Tabuo	162,000,000	i Tabuo	163,000,000	3 Tabus	336 000 000	ориртър	Казва
		2 13 01 2 06 04	Penyediana Bahan Laganik Kantor	Termedianya baban Ingganik kantor	l Tabus	36 021 300	l Tabus	00 000 D00	l Tabus	000 000 CP	l Tabuo	96.700.000	l Tabus	100 200 200	l Tabus	103,000,000	3 Tabus	483 200 000	ориртър	Kesa Bir
		2 13 01 2 06 03	Povyci sao Barang Cosk so dao Ponggandaso	Tersedianya barang coakan dan penggandaan	l Tabuo	80.594.900	l Tabus	000 000 68	l Tabus	37 200 D00	l Tabus	000.000.00	l Tabuo	94 200 000	i Tabuo	000 DOO 6F	3 Tabus	453,700,000	ориртър	Казв
		2 18 01 2 06 06	Proyedisso Básso Basso das Persuras Peruodas guedas gas	Termelianya zura Yabar/baban baman Yang termelia	l Tabus	29.928.000	l Tabus	31.125.000	l Tabus	32 200 000	l Tabus	22 400 000	l Tabus	25.000.000	l Tabus	000 000 ود	3 Tabus	168 323 000	OPMPTSP	Казва
		2 13 01 2 06 03	Рэзінээ Киојиодая Тэзэи	Terzedisoys oskao dao olouo issou	l Tabuo	12.019.600	l Tabuo	12 300 000	l Tabuo	13,000,000	l Tabus	13 200 000	l Tabus	14 000 000	l Tabuo	1 4 ∆20 000	3 Tabus	67 620 000	ориртър	Kana Bu
		2 13 01 2 06 09	Proyetonggaraan Paga Kaardinaan dan Kansulian SKPO	Torodoogaraaya rapa koordooo daa koondoo SKPO	i Tabuo	31,000,000	l Tabus	120 000 000	l Tabus	124 200 000	i Tabus	129.700.000	l Tabu	125.000.000	l Tabus	140 000 000	3 Tabus	00Q 00C PF6	ориртър	Казва
		2 18 01 2.07	Programa Barang Militz Osorski Provojang Urusan Provonorski Osorski			0		230,000,000		239,000,000		243 000 000		238,000,000		263 000 000		1243,000,000	OPMPT&P	Kon Bi
		2 13 01 2 07 03	Program Mind	Michiel yang dibulubkan	0	0	l Tabus	130,000,000		136,000,000		162 000 000		163,000,000	l Tabus	173 000 000		311,000,000		Kan Bi
		2 13 01 2.07 06	Programo Persiano dae Meso Lacoya	digninggan Geograpia		0	l Tabus	30 000 000	l Tabus	83,000,000	l Tabus	36 DOO DOO	l Tabuo	000 000 OF	l Tabus	000 DOO	3 Tabus	432,000,000	OPMPTSP	КозВ
		2 13 01 2.03	Posychism Jaco Posuojang Urusan Posteriorakan Daerak			209.104.038		400 000 000		416,000,000		432,000,000		449.000.000		467,000,000		2.164.000.000	ориртър	Казв
		2 13 01 2 03 02	Programa Jaca Kamunikan, Sumber Daya Air dan Libink	Poodayaraa jaca kaasuuskaa, asaabar daasaa daa kaask	Tabus	107 481 438	l Tabus	130,000,000	l Tabus	136,000,000	l Tabuo	162,000,000	l Tabus	000.000.661	i Tabuo	173,000,000	3 Tabus	311,000,000	ориртър	Коз Во

2   8 0   2 0 8 0 4	Proyections Jose Pelayanan Urausa Kanter	Toraadisays jaas Polsysosa Vasua Kasiar	Tabus	000 CEN 161	l Tabus	250 000 000	l Tabus	260 000 000	l Tabus	270 000 000	i Tabuo	281 000 000	l Tabuo	292 000 000	3 Tabus	1 233 000 000	ориртър	
2 18 01 2.09	Posocialamos Gamos Milita Casmá Posusjas gUrusos Posomoralas Casmá	T-SELECT TO THE SELECT TO THE		148 #11 000		270 000 000		280 400 000		291.700.000		000 000 دود		000 000 610		1.464.200.000	ориртър	_
2 18 01 2 09 02	Росусијаво Јага Росијајатаво, Виуз Росијајатаво, Рајаќ, фас Рогионо Кообатаво Ојекк Орствовом и на Lapsogao	pendikaran Kendaran Diose Operanosi asu Lapangan yang dilakansakan	l Tabus	94 090 000	l Tsauc	123 000 000	l Tabus	000 000 06 1	i Tabus	100,000,000	l Tabus	1 40 000 000	l Tabus	130,000,000	3 Tabus	630 000 000	ориртър	
2 18 01 2 09 06	Ptoodrikarso Ptosisso dan Micon Lannya	pecetikaran Peralasa dan Meno Isroeya yang dilakan akan	l Tabus	000 OPO P	l Tabus	25 000 000	l Tabus	000 00k 6C	l Tabus	27 200 000	l Tabus	000 000 ود	l Tsauc	41 200 200	3 Tabus	000.002.951	ориртър	
2 13 01 2 09 09	Pozodi karaza / Pokaki II izo Godung Kanter dan Bangunan Lannya	Terzedisoya Pecechiastoso/Pelasini IIso Geduog Kasier dao Baoguoso Laicoya	l Tabus	J6 J31 J00	l Tabus	30 000 000	i Tabus	000 000 CE	l Tabus	26 200 000	l Tabus	90 000 00	i Tabus	000 00C CP	3 Tabus	000 000 دده	ормртар	
2 13 01 2 09 11	Poodribanae / Pobabilises Sanas dae Pracanaea Poedukung Godung Kasier siau Bangunae Lainnya	Ambicaligna Ambicaligna Ambicaligna	l Tabus	9.130.000	l Tabus	000 000 00	l Takuo	31 200 000	i Tabus	32 A00 D00	l Tabus	000 000. وو	l Takun	33,000,000	3 Tabus	162,300,000	ОРИРТЪР	
2 15 02	РЕОСТЯМ РЕИСКИЯМОСКИ ІКШИ РЕИМИКИМИ МОВАЦ	hiddertor ranio daya serap tenaga berja POSA POSO, Jumbik Perda yang mendukung didin. umba		٥		250,000,000		70.000.000		٥		٥		٥		420,000,000	OPMPTSP	•
18 02 2 01	Poucapa Poučena Padina(lossuil Diáldag Poucasa Godal yang osopali Kovcoango Caerak Kakupaso/Koa			0		200 000 000		70 000 000		0		0				270 000 000	ориртър	
2 13 02 2 01 01	Pencapan Kebuakan Carab mengena Pemberan Panluar/leasoni dan Kemudaban Penananan Medal	Jumiah Perda yang Jerhij		0	l perda	200 000 000	0	0			0	0	0	0	l porda	200 000 000	ориртър	
2 18 02 2 01 02	Braiuso Postososo Postososo Psoinso/lesseni dae Komudatas Postososo Medal	Jumish kopasa orahusa	0	0	0	0	1 Корван	70 000 000	-	•	0	0	0		i kapasa	70 000 000	OPMPT&P	
2 18 02 2 02	Ротония Роз Росто Тоустат Карила со (Кога			0		130,000,000		0		0		0		0		130,000,000	ориртър	4
2 13 02 2 02 01	Proyusuose Rocces Visuse Prosessos électal Carrab Kabupaco (Kasa	Jumish dakuman RUP	0	0	l Odkumen	73 000 000	0	0		0	0	0	0	0	I Odvomen	73,000,000	ориртър	
2 13 02 2 02 02	Proyections Pola Polesso dan Petuang Usaka Kabupaten/Kara	دمن معسشة شاهدار مدمون معمور	0	0	I Odkumen	73 000 000	•	0			0	0		0	l Odkumen	73,000,000	OPMPTSP	
2 18 08	РЕОСТЯМ РЕОМОБІ РЕМІКИМИ МОВАЦ	Jambik invertor POL(POLIO), Jambik Otlisi invertosi POL(POLIO)		۰		195,000,000		125,000,000		127.000.000		120.000.000		125,000,000		732.000.000	OPMPTSP	•
2 13 03 2.01	Poydogyman Pranom Posososo Kladal yang ocojadi Kewasagan Damah Kabupato/Kasa			0		00Q 00Q CP I		123,000,000		127 000 000		130,000,000		133,000,000		712.000.000	ориртър	ľ
2 13 03 2 01 01	Posyusuose Sirsion Process Posessose Medal	Jumish Dakuman മന്മതു ഉറത്തത	0	0	l Dakuman	73 000 000	0	0			0	0	0	0	l Odvomen	73,000,000	ориртър	
2 18 03 2 01 02	Printense Kepas Preses Posas as dieta Carab Kabupaco/Kes	Jumish Promon yang dilakanakan		0	l Koganao	120 000 000	1 Кодина	123 000 000	1 Караза	127 000 000	1 Кораза		1 Корина	132 000 000	) years	637,000,000		_
2 18 04	PROCESIA PELAYANIA PENANGAN MODAL	ioma waktu penguruan perintam melahui 066 dan - E- Perintam, Survey Kepunan di myarakat		0		860,000,000		696,000,000		712.000.000		862.000.000		7792.000.000		2.892.000.000	ориртър	ř
2 13 04 2 01	Prisyanse Pensosa dae Alex Pensosa scens Terpadu Sau Pieu dibidaeg Pensosasa Medal yang erenjadi Kewerangan Daerah Kabupaco / Kesa			0		990 000 000		000 000 666		713,000,000		362 000 000		772 000 000		ססת מסת נפע נ	ОРИРТЪР	ľ

2 13 04 2 01 01	Povyci sao Prisysoso Terpadu Persoso dae Asopersoso Berússos Ziscen Prisysoso Persoso Gerussias Terrolegyas sacers Weisresik	ionagicacaissays CSS das Effensoss	0	0	l Kagasa	100 000 000	0	0	0	0	1 Караза	120,000,000		0	2 kayana	220 000 000	орирта
2 18 04 2 01 02	Pemanjawa Pemenukan Kamilimen Pemanan dan Am Pemanan Pemananan diadai	Laccarcya proces persoas	0	0	1 Караа	900 000 000	i kapasa	624 000 000	I Караза	000 000 PF6	і Караза	673,000,000	I Караа	702 000 000	) kapam	J 230 DOO DOO	орирт
2 18 04 2 01 03	Proyedisso Laysosa Koosulisso dao Progedisso Progeduso Glavyanka ierbadap Priaysosa Tempadu Pemposo dao Aleo Pemposo	Jumisi Oss progeduse dan kompilise	1 Караа	0	l Kayasa	90 000 000	l Kagasa	62 000 000	I Караа	64 000 000	1 Караа	67,000,000	I Караза	70 000 000	) kayan	323 DOD DOD	ормет
2 18 04 2.01 04	Kaardo sa daa Sekranissa Pancapan pankarisa Panliisa/lossaiil Osarsk	Terkendiem das iemokreisms pecapas peseras laniuar/iemoii daeras	0	0	I Караж	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	i kogana	100 000 001	орирт
2 18 05	RODE	Indificator rando dagra merap temaga herja PARAJ PARAGO		226,122,000		260,000,000		274,200,000		281,700,000		295,700,000		412.000.000		1,922,700,000	орирта
2 (3 03 2 0)	Progradalna Priaksanaan Prononces Gladal yang oronjadi Kowasangan Dasma Kabupatan/Kora			326.122.000		360 DOO DOO		000 000 ₽76		J81.700.000		293,700,000		412,000,000		1,923,700,000	орирт
2 18 03 2.01 01	Kaardiosa daa Mokraaisaa Paasaisusa Pelskaassa Paasasasa Madal	Junisi Pomensus	1 Караза	49 700 000	1 Караза	70 000 000	I Караза	72 200 000	1 Караза	73.700.000	1 Кария	78,700,000	1 Караза	32 DOO DOO	) kayaan	379 200 000	OPMPT
2 13 03 2 01 02	Kaardiosa daa Siokraansaa Paadiosaa Pasksaasaa Passaasaa Madal	Jumisia Pomisiosen	1 Караза	181 222 000	1 Караза	000 000 001	1 Караза	197 200 000	1 Караза	000 000 691	1 Кария	203 000 000	1 Караа	213,000,000	) kayaan	1 000 000 000	орирт
2 18 03 2 01 03	Kaardiosa daa Sobraalsaa Pauguussaa Palsbaassaa Paussaasa Gladsi	Јишко Разумаци	1 Караза	000 004 6F	і Караза	100 000 000	1 Караза	104 000 000	1 Караза	103 000 000	1 Кария	112 000 000	1 Караа	117,000,000	) kapasa	341 000 000	орирт
2 18 06	PROGRAM PENCELOLAM DATA DAN KETEM MUORMAKI PENMIMAN MODAL	Janahik Perintan		0		200,000,000		0		0		208.000.000		0		408,000,000	орирт
2 13 06 2 01	Progetolase Caradae Informace Personae dae Ako Personae yang Terrologram pada Tingka Caserak Kabupates/Kera			0		200 000 000		0		0		203 000 000				403 000 000	OPMPT
2 13 06 2 01 01	Programa, Provpija dao Propolasao Das dao lolombao Proposa dao Ato Proposa Gerbanz Maceo Pringosa Proposa Gerusaka Tenolograp accara Mekintolik	Jumisi das Porsoso	0	0	1 Караж	200 000 000	0	0	0	0	I Караза	203 000 000	0	0	2 kayasa	403 000 000	орирта
	Jumpia			4,990,952,689		7,848,025,000		7.298.440.000		7,516,650,000		8.121.750.000		8.114.770.000		28.944.625.000	

# KINERJA TAKTIKAL PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

Program	:	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Sasaran Program	:	Meningkatnya investasi
Indikator Program	:	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
Target Program	:	Tahun 2024 : 3 Tahun 2025 : 3

Program	:	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Sasaran Program	:	Meningkatnya investasi
Indikator Program	:	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota
Target Program	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1

Program	:	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Sasaran Program	:	Meningkatnya investasi
Indikator Program	:	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota
Target Program	:	Tahun 2024 : 2 Tahun 2025 : 2

Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Sasaran Program	:	Meningkatnya investasi
Indikator Program	:	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota
Target Program	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1

Program	:	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Kegiatan	:	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya PERDA yang mengatur Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen PERDA
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 83.108.000 Tahun 2 Rp. 83.108.000

Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	:	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 58.141.040,- Tahun 2 Rp. 50.000.000,-

Kegiatan	:	Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/ Kota
Sasaran Kegiatan	:	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kota Binjai
Indikator Kegiatan	:	Jumlah dokumen dan produk promosi investasi
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 54.639.000,- Tahun 2 Rp. 50.000.000,-

Program	:	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Indikator Kegiatan	:	Pameran Investasi
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 26.500.000 Tahun 2 Rp. 50.000.000

Program	:	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan	:	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya kegiatan BIMTEK bagi Pelaku Usaha
Indikator Kegiatan	:	Jumlah kegiatan BIMTEK
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 272.995.000,- Tahun 2 Rp. 250.000.000,-

Kegiatan	:	Pengawasan Penanaman Modal
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal
Indikator Kegiatan	:	Jumlah LKPM yang Dilaporkan
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 117.145.000,- Tahun 2 Rp. 120.000.000,-

Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya Database Data dan Informasi Perizinan
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Database Data dan Informasi Perizinan
Target Kegiatan	:	Tahun 2024 : 1 Tahun 2025 : 1
Anggaran Kegiatan	:	Tahun 1 Rp. 16.210.000,- Tahun 2 Rp. 50.000.000,-

Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat

Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission)

#### Sasaran DPM-PTSP

Meningkatnya Profesionalitas Layanan Perizinan

#### **Indikator Sasaran DPM-PTSP**

Lama Pengurusan Perizinan Melalui e-Perizinan

#### **Program 1 DPM-PTSP**

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### **Indikator Program 1**

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### **Kegiatan 1 DPM-PTSP**

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal

#### **Indikator Kegiatan 1**

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### Sub Kegiatan 1

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan di Bidang Modal

#### **Indikator Sub Kegiatan 1**

Jumlah Dokumen (PERDA)

#### **Program 2 DPM-PTSP**

Promosi Penanaman Modal

## **Indikator Program 2**

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### **Kegiatan 2 DPM-PTSP**

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

#### Indikator Kegiatan 2

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### **Sub Kegiatan 2**

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah

#### **Indikator Sub Kegiatan 2**

Jumlah Pameran Promosi Penanaman Modal

#### **Program 3 DPM-PTSP**

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### **Indikator Program 3**

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### **Kegiatan 3 DPM-PTSP**

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah

#### **Indikator Kegiatan 3**

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### Sub Kegiatan 3

Pengawasan Penanaman Modal

#### **Indikator Sub Kegiatan 3**

Jumlah LKPM yang Dilaporkan

#### **Program 4 DPM-PTSP**

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### **Indikator Program 4**

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### **Kegiatan 4 DPM-PTSP**

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yg Terintegrasi pd Tingkat Daerah

#### Indikator Kegiatan 4

Persentase Peningkatan Investasi di Kota Binjai

#### **Sub Kegiatan 4**

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

#### Indikator Sub Kegiatan 4

Jumlah Database Data dan Informasi Perizinan

#### BAB VII

#### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian pembangunan daerah. Dalam kinerja perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Tabel 7.1
Target Indikator Sasaran Per Tahun

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Kondisi Kinerja pada akhir periode				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	RPJMD
1.	Jumlah Nilai Investasi							

	PMA/PMDN							
a.	Jumlah Nilai Investasi PMA (dalam milyar rupiah)	0	5,2	5,4	5,6	5,8	6	
b.	Jumlah Nilai Investasi PMDN (dalam milyar rupiah)	941	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150	
2.	Jumlah Perizinan	3.275	3.500	3.640	3.780	3.930	4.085	
3.	Lama Pengurusan Perizinan melalui OSS	7 hari setelah berkas lengkap	7 hari setelah berkas lengkap	7 hari setelah berkas lengkap	6 hari setelah berkas lengkap	6 hari setelah berkas lengkap	5 hari setelah berkas lengkap	
4.	Lama Pengurusan Perizinan melalui E-Perizinan	21 hari setelah berkas lengkap	21 hari setelah berkas lengkap	21 hari setelah berkas lengkap	20 hari setelah berkas lengkap	20 hari setelah berkas lengkap	19 hari setelah berkas lengkap	
5.	Survey Kepuasan Masyarakat	81.75	85	87	88	89	90	
6.	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan	80	82	85	87	88	90	

7.	Rasio Daya	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	
	Serap Tenaga							
	Kerja							
	PMA/PMDN							
9.	Jumlah Perda	0	1	0	0	0	0	
	yang							
	mendukung							
	iklim usaha							

## Setelah dilakukan kaji-ulang, Tabel 7.1 direvisi menjadi :

Tabel 7.1
Target Indikator Sasaran Per Tahun

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Ta 2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
-	3.5 1 .	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2
1.	Meningkatnya Investasi	-	-	-	-	3	3	3
2.	Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission)	8	7	7	7	6	6	5
3.	Lama Pengurusan Perizinan Melalui e- Perizinan	21	21	21	20	20	19	19

# BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program kegiatan untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai di bidang penanaman modal.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini sifatnya merupakan dokumen strategis dan global yang masih perlu dijabarkan kedalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra DPMPPTSP Kota Binjai ini selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang kemudian diuraikan kedalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPPTSP Kota Binjai sebagai dasar Pengusulan Anggaran. Keberhasilan Renstra DPMPPTSP Kota Binjai ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semua pihak-pihak yang terkait terutama Pegawai di lingkup DPMPPTSP Kota Binjai di samping juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPPTSP Kota Binjai kepada pihakpihak tekait baik sebagai Stake Holder ataupun lainnya yang telah ikut mengambil bagian dengan berpartisipasi Aktif membantu pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi DPMPPTSP Kota Binjai yang dijiwai dengan semangat kebersamaan untuk mencapai cita-cita, tujuan, dan sasaran DPMPPTSP Kota Binjai.

Lampiran 1 Mengidentikasi indikator-indikator tujuan dan sasaran dengan metode SMART:

No.	Indikator	Spesific	Measurable	Achieveable	Relevant	Time- Bound
1.	Meningkatnya Investasi	Investasi	Persentase peningkatan investasi	Peningkatan investasi	Penanaman Modal	1 tahun
2.	Lama Pengurusan Perizinan Melalui OSS (One Single Submission)	Izin usaha	Durasi hari pengurusan izin	Efisiensi waktu pengurusan izin	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 tahun
3.	Lama Pengurusan Perizinan Melalui e-Perizinan	Semua izin terkait di Kota Binjai selain izin usaha	Durasi hari pengurusan izin	Efisiensi waktu pengurusan izin	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 tahun